

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember

Zulfidda Lillah^{1*}  Djuara P Lubis¹  Dwi Sadono¹ 

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia

* Korespondensi: zulfidda2808@gmail.com ; Tel: +62-856-9519-5982

Diterima: 25 Maret 2024 ; Disetujui: 30 Oktober 2024; Diterbitkan: 31 Desember November 2024

Abstrak: Efektivitas program kemitraan konservasi merupakan ukuran tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi dan mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sosial pada program kemitraan konservasi. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 60 responden di 4 blok manajemen pada bulan April-Mei 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi cukup efektif. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan pendapatan petani, peningkatan ekonomi (sebelum dan sesudah mengikuti program), peningkatan jumlah tanaman pokok dan jumlah bibit yang ditanam dan yang memiliki korelasi signifikan pada kesejahteraan petani. Fakta dilapang ditemukan masih terdapat blok pengelolaan masih 40% dari kewajiban menanam tanaman pokok. Dampak ekonomi yang didapatkan oleh petani setelah mengikuti program kemitraan konservasi memberikan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pendapatan 4- 30 juta rupiah/tahun. Dampak secara sosial kini antar petani yang mengelola kawasan konservasi menjadi lebih kompak menjaga kawasan serta pertemuan rutin yang dilakukan sangat membantu keluhan petani saat menghadapi kendala dilahan.

Kata kunci: efektivitas, pemberdayaan masyarakat, kemitraan konservasi

Abstract: The effectiveness of a conservation partnership program is a measure of the level of success in achieving predetermined goals. This research aims to analyze the effectiveness of community empowerment in improving farmer welfare in conservation partnership programs and determine the economic and social impact of community empowerment in conservation partnership programs. This research was conducted by interviewing 60 respondents in 4 management blocks in April-May 2023. Data collection was carried out using the purposive sampling method. Data were analyzed using SPSS 23. The research results showed that the effectiveness of community empowerment in improving farmer welfare in the conservation partnership program was quite effective. This can be seen from the increase in farmer income, economic improvement (before and after participating in the program), increase in the number of staple crops and number of seeds planted and which has a significant correlation with farmer welfare. In fact, in the field it was found that there were still management blocks that still accounted for 40% of the obligation to plant staple crops. The economic impact obtained by farmers after participating in the conservation partnership program provides an increase in income that can be used for daily needs and an increase in income of 4-30 million rupiah/year. The social impact is now that farmers who manage conservation areas are becoming more united in protecting the area and the regular meetings that are held really help with farmers' complaints when they face problems on the land.

Keywords: effectiveness, community empowerment, conservation partnership

1. Pendahuluan

Pembangunan Pembangunan pada era saat ini tidak lagi berpusat pada pemerintah namun juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Yogia dan Suri, 2020). Pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah sering kali terhambat oleh karena pemerintah kurang matang dalam perencanaan

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3328>

DOI : [10.33007/ska.v14i1.3328](https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3328)

kepada siapa, apa program yang dibutuhkan dan cara yang efektif untuk dapat menyampaikan program pembangunan nasional. Program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta dapat memberdayakan masyarakat pada taraf ekonomi lemah. Program pembangunan salah satunya terdapat pada kawasan konservasi yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki di kawasan lain. Program yang berada pada kawasan hutan konservasi memiliki berbagai aturan ketat untuk dapat mengelolaa berdasarkan aturan yang telah disepakai bersama UPT taman nasional dengan pihak mitra. Pembangunan pada bidang kehutanan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan komitmen untuk pengembangan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan konservasi secara tidak bijaksana menimbulkan kerusakan lingkungan serta potensi konflik yang terjadi dimasyarakat.

Kawasan hutan memiliki berbagai macam potensi dari sumber daya alam hingga sumberdaya mineral yang terkandung di dalamnya. Potensi pada kawasan hutan tidak hanya berupa pemanfaatan kayu namun juga potensi tanaman non kayu yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi dan budaya serta mengedepankan kaidah konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Hubungan timbal balik masyarakat dengan kawasan konservasi haruslah disepakati bersama melalui prinsip yang setara. Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan jangka pendek hingga jangka panjang sekaligus memegang teguh nilai-nilai kemanfaatan lintas generasi (Wiratno, 2018). Pemanfaatan kawasan hutan tentu saja harus sesuai dengan kesemimbangan lingkungan yang tidak hanya berorientasi ekonomi namun juga berwawasan lingkungan yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, menghentikan penurunan fungsi lahan dan mengurangi

Kawasan kemitraan konservasi merupakan bentuk kerjasama antar stakeholder yang menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama melalui konsep saling percaya, saling menguntungkan dan gotong royong. Kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No P.6/KSDAE/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi mengatur dua lingkup dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Skema ini menjamin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diperoleh dari kawasan konservasi (Prayitno, 2020). Kemitraan konservasi sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan konservasi melalui penetapan zonasi. Penetapan zonasi dilakukan supaya masyarakat mengerti bahwa kawasan konservasi juga memiliki keterbatasan akses untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penataan kawasan konservasi ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem di setiap kawasan konservasi (KLHK, 2023). Zona yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan berada di zona rehabilitasi taman nasional atau blok rehabilitasi suaka marga satwa, taman hutan raya atau taman wista alam atau areal yang telah mengalami kerusakan dan bukan pada areal jelajah satwa dilindungi atau habitat dilindungi.

Permasalahan yang terjadi pada Taman Nasional Meru Betiri dilatarbelakangi oleh kerusakan kawasan hutan konservasi akibat pembalakan liar pada tahun 1998. Masyarakat yang berada disekitar kawasan konservasi sebagian besar hanya bekerja serabutan sebagai buruh tani, buruh bangunan hingga bekerja keluar negeri tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki lahan pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari. Kerusakan hutan yang terjadi menggerakkan masyarakat sekitar kawasan taman nasional untuk merehabilitasi kawasan hutan dengan memberdayakan masyarakat turut serta dalam pengembalian kawasan hutan. Program rehabilitasi lahan dilakukan pada periode tahun 1998-2022 bertujuan mengembalikan fungsi hutan TNMB dan dilanjutkan melalui program pemulihan ekosistem. Kesadaran masyarakat sekitar dalam

menjaga kelestarian lingkungan khususnya pada pemulihan kawasan hutan yang telah rusak masih cukup rendah. Hal ini didukung oleh penelitian (Mariyani dan Suciati, 2021) menemukan bahwa kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan TNMB dihadapkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara tanaman pokok dan kewajiban penanaman tanaman pokok atau tutupan yang belum terpenuhi. Program yang telah berlangsung hampir dua dekade ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan dari segi ekologi (tutupan kawasan), segi ekonomi dan sosial.

Masyarakat yang hidup disekitar kawasan taman nasional tidak memperoleh ijin untuk memanfaatkan sumberdaya hutan menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan tindakan illegal untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah melalui UPT taman nasional memberikan ijin pengelolaan kepada masyarakat melalui program kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi ini merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan untuk mengkonservasi kawasan hutan yang telah rusak dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengolah kawasan tradisional yang ada di Kawasan Pelestarian Alam yang berada di zona tradisional. Program kemitraan konservasi memiliki prinsip untuk saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling percaya (KLHK 2018). Kemitraan konservasi di kawasan TNMB ini melalui skema pemberdayaan masyarakat yang mana memiliki tujuan pengembalian kawasan yang rusak serta memposisikan masyarakat/kelompok sebagai mitra yang setara. Kemitraan konservasi sebagai salah alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan kawasan konservasi antara pihak taman nasional dengan masyarakat melalui pengelolaan bersifat kolaboratif. Kemitraan konservasi melalui skema pemulihan ekosistem ini turut serta untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk dapat mengelola kawasan serta mendapatkan manfaat dari hasil hutan bukan kayu dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemitraan konservasi melalui skema pemberdayaan masyarakat merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip kesetaraan, lokal spesifik, kesepakatan transparansi dan partisipasi (Situmorang et al. 2022).

Pemberdayaan masyarakat secara umum ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah sehingga setelah diberdayakan mereka dapat memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Suharto (2017) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2017) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginan. Termasuk aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan masyarakat yang berada pada kawasan hutan konservasi menjadi tantangan untuk dapat menjaga keseimbangan lingkungan serta kebermanfaatan bagi masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan tentu saja memiliki perbedaan dengan program pemberdayaan lainnya. Program pemberdayaan di sekitar kawasan hutan tidak hanya mengutamakan adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berdaya namun juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat lokal, menyediakan mata pencaharian dan kaodah konservasi (Fisher et al., 2018). Program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) Wonomulyo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan penanaman tanaman pokok serta pemanfaatan sumberdaya hasil hutan non kayu (nangka, durian, mengkudu dan alpukat).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pendampingan terkait kelestarian lingkungan kawasan, pemanfaatan tanaman non kayu pada lahan tradisional serta, penanaman tanaman pokok (pakem, djuwet, kepuh dan sonokeling) dikawasan hutan yang telah rusak. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (Yumantoko, 2022).

Kegiatan kemitraan konservasi tidak dapat terlepas dari fasilitator/penyuluh yang memiliki peran untuk membantu kelompok tani mengelola lahan. Hasil penelitian (Okthalamo et al. 2022) bahwa Kemitraan konservasi pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TBBBS) memberikan kesempatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaantaman nasional dengan memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem Kegiatan penyuluhan diharapkan memiliki pembinaan yang berkelanjutan bagi para petani serta mampu meningkatkan peran aktif dan memberikan dorongan untuk dapat lebih baik salah satunya pada bidang kehutanan. Penyuluh pada bidang kehutanan khususnya pada kawasan konservasi memberikan pembinaan mengenai kegiatan budidaya tanaman hutan serta memberikan pendampingan kepada petani mengenai potensi ekonomi dan pemanfaatan jasa ekosistem kawasan hutan Elena et al. (2021). Penyuluh sebagai perwakilan dari UPT Taman nasional yang interaksi secara langsung dengan petani. Memiliki tugas untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran menjaga lingkungan dan kesejahteraan anggota kelompok. Penyuluh kehutanan pada program kemitraan konservasi sebagai fasilitator yang memiliki fungsi mendampingi terkait pembentuk kelompok, penyusunan rencana kerja, proposal dan pendampingan pemberdayaan dilapangan (Putri et al. 2022).

Program yang berjalan tentu tidak dapat terlepas dari partisipatif aktif dari anggota kelompok untuk melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Program pemulihan ekosistem yang dilaksanakan dari tahun 2016-2019 melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan anggota kelompok namun belum efektif pada penerapan tutupan tanaman pokok. Indikator efektivitas program kemitraan konservasi diukur melalui tiga kelompok penilaian yakni: 1) Indikator lingkungan, tata kelola kawasan, 2) Indikator ekonomi, tata kelola ekonomi dan kesejahteraan, 3) Indikator sosial dan budaya penguatan kelembagaan dan modal sosial (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Partisipasi petani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemulihan ekosistem dengan pola partisipasi dengan petani mitra (Guntoro 2018). Partisipasi anggota kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) dalam program kemitraan konservasi dengan skema pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara optimal atau dapat dikatakan tujuan dari LMDHK belum tercapai (Charistandi dan Widjyanthi 2021). Efektivitas program kemitraan konservasi yang masih belum mencapai efektif dari peningkatan ekonomi yang diperoleh oleh petani, secara ekologi terkait peningkatan tutupan tanaman pokok yang telah disepakati bersama dan secara sosial kemudahan petani untuk berinteraksi dengan penyuluh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap program kemitraan konservasi. Menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial dan ekologi pada program kemitraan konservasi.

Penelitian terdahulu yang mengangkat terkait topik efektivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi. Pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi tidak hanya melindungi kawasan hutan namun juga dapat memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat di sekitrar kawasan konservasi. Sitaresmi et al., 2023 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa upaya konservasi juga harus memperhatikan prinsip pemanfaatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat di kawasan Hutan Sesaot dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman fasilitator terkait tujuan program pemberdayaan dalam menyampaikan kepada petani (Yumantoko, 2022). Terdapat kajian terkait pemberdayaan melalui pola kehutanan efektif memberikan keuntungan dari segi sosial dan ekonomi (Jazadi et al., 2023). Efektifitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Antajaya Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh kolaborasi pemerintah desa dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam

mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan secara tepat sasaran (Mauludi et al., 2023). Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi memiliki manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial. Hal ini didukung oleh (Saragi, 2023) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat di Taman Hutan Raya selain memiliki manfaat meningkatkan pendapatan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketergantungan masyarakat Desa Gapit dan Boal karena menganggap bahwa hutan satu satunya sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sumber peningkatan kesejahteraan (Jazadi et al., 2023).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional dengan menggunakan responden sebagai sumber informasi untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam memperoleh sample responden menggunakan purposive sampling (secara sengaja). Penentuan responden didasarkan karena anggota LMDHK Wonomulyo adalah salah satu kelompok binaan TNMB yang diberikan ijin pengelolaan kawasan hutan sejak tahun 1998 yang belum memahami manfaat adanya program kemitraan konservasi. Kegiatan pemulihan ekosistem yang dilakukan pemberdayaan namun hanya sebatas penanaman tanaman hutan tanpa dilakukan monitoring dan pendampingan yang intensif. Kegiatan pemulihan ekosistem tidak hanya mengembalikan kawasan hutan tetapi turut serta melibatkan anggota kelompok turut pemberdayaan. Pesan komunikasi yang diberikan kepada sasaran tidak hanya menyangkut pada pemanfaatan kawasan hutan namun mengutamakan kaidah konservasi. Hal ini didukung hasil penelitian Lillah (2020) yang menemukan bahwa pemanfaatan kawasan kemitraan konservasi masih memiliki perbedaan makna antara anggota LMDHK dengan taman nasional dalam tujuan tutupan tanaman pokok.

Menurut Sugiyono, (2016) menyatakan bahwa purposive sampling yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menetapkan sample penelitian dengan cara memilih lokasi sesuai dengan tujuan dan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan april 2023 hingga Agustus 2023. Lokasi penelitian di Resort Wonoasri, Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. Sample penelitian dilakukan kepada anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK Wonomulyo) yang meliputi empat blok pengelolaan kawasan kemitraan konservasi (blok Pletes, Bonangan, Donglo dan Curah Malang). Responden pada penelitian ini adalah dua orang dari masing-masing pengurus inti anggota kelompok tani dan 52 orang anggota yang dipilih secara acak dan proporsional pada tiap blok sehingga total berjumlah 60 petani. Pengambilan data kepada informan dengan menggunakan kuesioner dan didukung data sekunder melalui literatur review (jurnal dan buku). Analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 23 untuk mengukur korelasi dan signifikansi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas dipahami sebagai suatu ukuran atau tingkat ketercapaian suatu program. Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Gunantoro, 2017). Efektivitas dapat dilihat dari kemampuan dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan. Pencapaian tujuan bersama dapat dilihat secara nyata. Efektivitas suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan organisasi atau pemerintahan, maka perlu adanya indikator atau pengukuran terhadap efektivitas tersebut (Idris et al. 2023). Indikator yang dimaksud dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan suatu program/kebijakan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sasaran. Menurut (KLHK, 2018) setidaknya terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program kemitraan konservasi dapat direalisasikan, yaitu; Indikator efektivitas keberhasilan diukur melalui tiga kelompok penilaian yakni: 1) Indikator lingkungan, tata kelola kawasan, 2) Indikator ekonomi, tata kelola ekonomi dan kesejahteraan, 3) Indikator sosial dan budaya penguatan kelembagaan dan modal sosial (KLHK, 2018).

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan adalah keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan (Damanik dan Purba, 2022). Keberlanjutan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari hutan sendiri sebagai daya dukung lingkungan selaras dengan kehidupan masyarakat melalui program kemitraan konservasi. Dampak yang dirasakan secara ekonomi turut membantu peningkatan pendapatan petani LMDHK Wonomulyo dengan menjual hasil hutan non kayu. Data dampak secara ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Dampak ekonomi pemberdayaan kelompok LMDHK pada program kemitraan konservasi

No	Peningkatan pendapatan (Juta/tahun)	Jumlah (individu)	Persentase (%)
1	1-4 (juta/tahun)	5	8,33
2	5-9 (juta/tahun)	35	58,34
3	10-14 (juta/tahun)	14	23,33
4	15-30 (juta/tahun)	6	10,00
Total		60	100

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil tabel 3.1 menjelaskan bahwa pemberdayaan bagi petani yang tergabung LMDHK Wonomulyo memiliki manfaat penambahan pendapatan dari hasil penjualan hasil hutan non kayu (HHBK) melalui program kemitraan konservasi. Menurut Guntoro *et al.* (2018) menemukan bahwa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mencapai 90% dari total nilai ekonomi dari ekosistem hutan. Manfaat secara ekonomi yang diberikan dari hasil hutan non kayu memberikan kesejahteraan bagi petani yang mengelola kawasan kemitraan konservasi. Peningkatan pendapat petani yang diberi ijin pengelolaan kawasan konservasi memiliki dampak yang berkelanjutan. Petani LMDHK Wonomulyo merasakan manfaat secara ekonomi dengan mengelola lahan yang diberikan dengan menanam tanaman non kayu. Peningkatan pendapatan dari hasil hutan non kayu yang di manfaatkan buahnya memiliki nilai jual ekonomis. Pendapatan petani dari yang terkecil sekitar Rp 4 Juta/tahun hingga Rp 30 juta/tahun. Peningkatan ini adalah hasil yang baik bagi petani mengingat turut membantu kebutuhan ekonomi petani dari kegiatan kemitraan konservasi terdapat petani yang bisa membeli kendaraan bermotor(sepeda dan mobil).

3.1 Dampak pemberdayaan secara sosial pada program kemitraan konservasi

Kebermanfaatan suatu program tidak secara langsung dirasakan oleh penerimanya. Pertemuan antar petani dengan difasilitasi oleh penyuluh/kepala resort untuk menampung aspirasi maupun sebagai sarana berdiskusi terkait pelaksanaan program kemitraan konservasi melalui pertemuan rutin. Pertemuan rutin yang telah disusun secara terjadwal memudahkan petani untuk saling sharing pengalaman terkait kendala pengelolaan lahan. Program kemitraan konservasi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sosial bagi petani penerima ijin pengelolaan.

Tabel 3.2 Dampak sosial pemberdayaan kelompok LMDHK pada program kemitraan konservasi

No	Peningkatan pertemuan	Kegunaan	Individu (jumlah)	Persentase (%)
1	Pertemuan antar petani dilahan	Sangat merasakan	49	81,66
		Merasakan	11	18,34

			Kurang merasakan	0	0
			Tidak merasakan	0	0
	Total			60	100
2	Pertemuan antar petani di luar lahan		Sangat mudah	46	76,66
			Mudah	14	23,34
			Sulit	0	0
			Sangat sulit	0	0
	Total			60	100

Sumber: Data diolah (2023)

Manfaat secara sosial dengan adanya program kemitraan konservasi petani menjadi lebih “guyub”/rukun serta sadar akan pentingnya menjaga hutan secara berkelompok dan saling menjaga. Menurut Gaol *et al.* (2022) menemukan bahwa keberlanjutan program kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan *Cycloop* masih rendah karena aturan kelompok yang belum dipahami dan ditaati serta belum adanya sanksi tegas. Aturan yang belum dipahami dengan baik bisa menjadi tantangan kelompok yang harus mengerti dan memahami aturan yang telah disepakati. Interaksi antar anggota kelompok menjadi modal utama untuk memudahkan pertukaran informasi. Kehadiran peran serta Taman Nasional Meru Betiri untuk mengakomodasi petani dan bermitra memberikan manfaat penggerak secara sosial saling bekerjasama mencapai tujuan program. Kemitraan konservasi menjadikan petani lebih mudah berinteraksi satu dengan lainnya melalui pertemuan rutin, kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial memiliki satu identitas “petani lahan rehab”. Kepedulian petani akan menjaga kawasan menjadi lebih kompak mengingat pengelolaan kawasan merupakan tanggung jawab bersama supaya aman dari gangguan yang tidak diinginkan.

3.2 Dampak pemberdayaan secara ekologi pada program kemitraan konservasi

Keberadaan hutan memberikan manfaat nyata kepada manusia baik manfaat yang diberikan secara ekologi, sosial budaya maupun secara ekonomi. Hutan yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik supaya kelak bermanfaat bagi generasi penerus. Keberlanjutan fungsi hutan tentu saja membutuhkan partisipasi masyarakat tidak hanya sadar namun juga perilaku untuk menjaga kelestarian muncul. Perilaku peduli lingkungan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan melalui pesan yang disampaikan bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mau dan mampu menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Tabel 3.3 Dampak ekologi pemberdayaan kelompok LMDHK pada program kemitraan konservasi

No	Peningkatan Lingkungan	Kegunaan	Individu (jumlah)	Persentase (%)
1	Berkurangnya erosi dan banjir	Sangat merasakan	45	75,00
		Merasakan	15	25,00
		Kurang merasakan	0	0
		Tidak merasakan	0	00
	Total		60	100

2	Ketersediaan air saat Kemarau	Sangat mudah	37	61,66
		Mudah	23	38,34
		Sulit	0	0
		Sangat sulit	0	0
	Total		60	100
3	Kemunculan satwa liar	Selalu melihat	40	66,66
		Sering melihat	14	23,34
		Jarang melihat	6	0
		Tidak melihat	0	0
	Total		60	100
4	Penurunan suhu disekitar kawasan	Sangat merasakan	23	28,34
		Merasakan	24	40,00
		Kurang merasakan	13	21,66
		Tidak merasakan	0	0
	Total		60	100

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3.3 menjelaskan bahwa dampak ekologi pada aspek peningkatan kondisi lingkungan meliputi berkurangnya erosi dan banjir, ketersediaan air saat kemarau, kemunculan satwa liar dan penurunan suhu disekitar kawasan kemitraan konservasi. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi di Resort Wonoasri dengan adanya program pemulihan ekosistem banjir tahunan secara berangsur banjir. Bencana banjir setiap tahun semakin parah puncaknya pada tahun 2018 yang membawa serasah ranting tanaman dan tanah erosi dengan jumlah cukup besar. Banjir pada tahun 2018 menjadi banjir terparah dengan lama genangan banjir di Resort Wonoasri selama satu minggu. Saluran sungai baru (sudetan) untuk menanggulangi aliran banjir sedalam empat meter dengan panjang sekitar satu kilo meter penuh dengan ranting dan hasil erosi hulu di kawasan Resort Wonoasri. Banjir yang selama ini menjadi rutinitas tahunan perlahan mulai berkurang waktu genangan air juga berkurang menjadi satu hari. Kawasan kemitraan konservasi saat ini mulai menunjukkan hasilnya dengan semakin rapatnya tanaman pokok. Hal ini memberikan dampak positif laju air di hulu dapat diserap dengan baik oleh tanaman.

Ketersediaan air menjadi kendala yang berulang kali terjadi ketika memasuki musim kemarau. Ketersediaan air ini menjadi penting sebagai sumber kehidupan untuk menyiram tanaman yang berada di kawasan kemitraan konservasi. Kawasan konservasi yang telah tertutup dengan tanaman pokok mulai merasakan hasilnya yaitu dengan munculnya sumber mata air yang berada di bawah pohon kepuh tepatnya berada Blok Pletes. Hal ini juga didukung oleh Peran *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa tindakan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Puhu dan Tapobali dengan menanam dan merawat pohon di hutan yang memiliki dampak positif bagi konservasi hutan dan sebagai upaya menjaga sumber mata Air Lawe supaya tetap tidak kering dikala musim kemarau.

Keberadaan hutan sebagai taman nasional menjadi sangat penting. Hutan sebagai paru-paru dunia juga menyimpan plasma nutfah yang cukup beragam sebagai tempat bagi tumbuhan dan hewan untuk dapat berkembang biak maka dibentuklah taman nasional sebagai upaya pelestarian. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri menjadi salah satu yang menerapkan kemitraan konservasi sebagai upaya untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak menjadi lebih baik. Salah satu keberhasilan program

kemitraan konsevasi adalah munculnya satwa ke karea zona tradisional. (KLHK, 2018). Kemunculan satwa liar teramati oleh petani pada blok pengelolaan Pletes. Kemunculan satwa ini menjadi indikator alami bahwa ekosistem hutan mulai membaik. Fakta dilapang bahwa kemunculan satwa yang terlihat pada kawasan kemitraan konservasi seperti kijang, babi hutan, trenggiling, burung serta monyet ekor pendek yang sedang memakan tanaman non kayu petani seperti kacang panjang, durian dan mengkudu.

Peningkatan suhu bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak memperhatikan dampak lingkungan salah satunya adalah deforestasi hutan (Wahyuni dan Suranto, 2021). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat mengembalikan kawasan hutan yang mengalami perubahan salah satunya dengan pemulihan ekosistem melalui skema kemitraan konservasi. Pemulihan kawasan hutan memiliki manfaat untuk menurunkan suhu udara. Fakta di lapangan menunjukkan petani merasa suhu yang berada di kawasan yang telah tertutup kembali ekosistemnya menjadi lebih sejuk dan asri. Kawasan konservasi yang dahulu gersang dan rawan longsor berkat partisipasi petani aktif kini menjadi lebih hijau dan teduh.

3.3 Hubungan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dengan Program Kemitraan Konservasi.

Efektivitas dapat dimaknai sebagai ukuran tingkat keberhasilan suatu program. Kontribusi yang dihasilkan pada pencapaian tujuan maupun sasaran yang ditentukan dikatakan tepat sasaran apabila mencapai tujuan dari berjalannya program Idris *et al.* (2023).

Tabel 3.4 Efektivitas program kemitraan konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani

No	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Konservasi	Nilai Koefisien
1	Jumlah bibit yang ditanam	0,000
2	Hasil tanaman non kayu meningkatkan pendapatan petani	0,000*
3	Peningkatan perekonomian petani sebelum dan sesudah mengikuti kemitraan konservasi	0,000*
4	Peningkatan jumlah tanaman pokok meningkatkan pendapatan	0,000*
5	Peningkatan pertemuan antar petani dilahan	0,000*

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan analisis tabel 3.4 menyatakan bahwa variabel yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini bermakna memiliki hubungan secara signifikan dan berkorelasi kuat dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap program kemitraan konservasi. Efektivitas sebagai proses yang sedang dan telah terlaksana untuk memberikan rekomendasi maupun masukan untuk berjalannya program yang lebih baik dan tepat sasaran bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi. Berdasarkan tabel 3.4 menjelaskan bahwa jumlah bibit yang ditanam memiliki hubungan signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi karena jenis bibit yang ditanam memiliki nilai ekonomis. Jenis bibit yang ditanaman meliputi tanaman non kayu seperti nangka, pete, mengkudu, mangga, durian, jambu mente, jambu mente dan cabe jawa. Keanekaragaman jenis bibit yang ditanam oleh petani telah mendapatkan ijin dan diketahui oleh pihak resort. Hal ini didukung penelitian Mariyani dan Suciati, (2021) bahwa kepatuhan petani LMDHK Wonomulyo dalam pemulihan ekosistem menjadi semakin baik dan tingkat kesejahteraan meningkat mengingat petani memanfaatkan keanekaragaman tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) yang memiliki nilai ekonomi. Penanaman berbagai jenis bibit dilakukan guna kawasan kemitraan hanya tidak hanya

memiliki jenis tanaman pokok namun juga terdapat tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya untuk dijual hasil buahnya.

Variabel peningkatan pendapatan memiliki hubungan secara signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada petani mengenai cara penanaman tanaman pokok dan pemanfaatan tanaman non kayu yang mulai membuahkan hasil dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini didukung oleh penelitian Prasetia *et al.* (2023) bahwa dampak yang dirasakan secara ekonomi dari penerapan kemitraan konservasi digunakan untuk membangun tempat tinggal hingga membeli kendaraan bermotor. Petani LMDHK Wonomulyo saat ini mulai merasakan hasil tanaman non kayu yang mereka tanam. Tanaman non kayu seperti durian, pete, mengkudu, nangka dan mangga sudah menghasilkan buah dan dapat dijual. Fakta dilapang petani sangat merasa senang dan terbantu dengan adanya ijin pengelolaan kawasan konservasi (kemitraan konservasi) dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membeli kendaraan bermotor. Salah satu hasil penjualan tertinggi pada tanaman *Pueraria Javanica* (Pj) dengan harga Rp 120.000/Kg dan mengkudu yang dapat dipanen sepanjang musim kemarau. Peningkatan ekonomi petani (sebelum dan sesudah mengikuti kemitraan konservasi) memiliki hubungan secara signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam keberlanjutan program kemitraan konservasi. Peningkatan ekonomi diperoleh dari penjualan tanaman non kayu yang ditanam sejak tahun 2015 mulai menghasilkan buah dan bernilai ekonomis.

Variabel peningkatan ekonomi petani (sebelum dan sesudah mengikuti kemitraan konservasi) memiliki arti hubungan secara signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi. Peningkatan ekonomi yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh petani dari hasil tanaman non kayu. Petani yang dahulu bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil hingga bekerja sebagai TKI dengan pendapatan dibawah Rp 1 juta/bulan. Program pemulihan ekosistem menjadi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembukaan awal program kemitraan konservasi melalui skema pemberdayaan masih kurang menarik minat masyarakat periode waktu tahun 2000 awal namun setelah berjalannya program yang hampir 27 tahun terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Program pemulihan ekosistem yang dimulai sejak tahun 1998 perlahan mulai terlihat manfaatnya, tanaman non kayu yang ditanam mulai menghasilkan buah dan bernilai ekonomis.

Variabel peningkatan jumlah tanaman pokok memiliki hubungan signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi. Jumlah tanaman pokok yang telah tertanam pada lahan pengelolaan milik petani masih belum sesuai dengan peraturan yang disepakati. Fakta dilapang ditemukan bahwa petani memiliki alasan bahwa tanaman pokok tidak menguntungkan. Hal ini dapat diketahui dari setiap pertemuan rutin guna dilakukan pengecekan terhadap tanaman pokok yang cukup banyak yang belum tertanam oleh petani. Namun hal ini didukung oleh data terbaru pada tahun 2022 sebanyak 15% dan pada tahun 2023 saat ini sudah mulai terjadi peningkatan tanaman tutupan sebesar 35%. Keterlibatan anggota petani LMDHK saat ini belum sepenuhnya sadar akan pentingnya penanaman guna menghijaukan kawasan konservasi.

4. Kesimpulan

Program kemitraan konservasi yang berjalan memiliki kebermanfaatan bagi kelompok masyarakat desa hutan konservasi untuk dapat melestarikan, menjaga serta mengelola kawasan dengan bertanggung jawab. Kemitraan konservasi cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan peningkatan pendapatan petani sebesar 4-30 Juta rupiah/tahun hingga dapat membeli kendaraan bermotor, efektif dalam meningkatkan tutupan tanaman pokok sebesar 35% dan efektif meningkatkan kesadaran petani untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Hubungan antara

efektivitas program pemberdayaan masyarakat dengan program kemitraan konservasi memiliki hubungan yang cukup signifikan dan berkorelasi kuat serta kemudahan interaksi dengan penyuluh. Kebermanfaatan yang timbul dengan adanya program kemitraan konservasi turut memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Dampak yang ditimbulkan secara ekologi dapat menjaga ketersediaan air saat kemarau, berkurangnya banjir dan kemunculan satwa liar namun dari partisipasi petani dalam penanaman tanaman pokok masih cukup rendah. Dampak secara sosial anggota kelompok terjadi kemudahan interaksi pertemuan lebih antar petani dan penyuluh. Hal ini karena adanya pertemuan rutin yang difasilitasi oleh pihak Resort Wonoasri.

5. Saran

Saran kepada pihak Taman Nasional Meru Betiri dapat lebih memonitoring tutupan tanaman pokok dengan melibatkan partisipasi aktif ketua kelompok maupun ketua LMDHK Wonomulyo. Ketua kelompok dapat menjadi sahabat taman nasional dalam memantau tutupan tanaman pokok. Sehingga fasilitator/penyuluh cukup terbantu dalam monitoring dan evaluasi terkait tutupan tanaman pokok. Pendataan terkait pendapatan yang diperoleh petani melalui kolaborasi riset dengan akademisi sehingga mendapatkan jawaban yang transparan dan terbuka oleh petani dapat menjadi masukan terkait pengembangan kebijakan kemitraan konservasi kedepannya. Peneliti mengharapkan pemangku kebijakan untuk dapat melakukan riset akademik terkait motivasi petani disekitar kawasan hutan terhadap keberlanjutan program kemitraan konservasi.

Ucapan terima kasih, Sebagai wujud penghargaan terhadap bapak dosen pembimbing saya yang terlibat dalam penyusunan naskah atau dalam penelitian dan/atau pengembangan riset terkait efektivitas program kemitraan konservasi. Pihak dari Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember untuk bantuan serta kesediaan sebagai tempat riset sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Charistandi, F., Widjayanthi, L. 2021. Partisipasi Petani Terhadap Program Rehabilitasi Lahan Rehab Kawasan Meru Betiri Di Desa Wonoasti Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jurnal Kirana*. 1(2);1-15.
- Damanik, S.E., Purba, T. 2022. Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Desa Pondok Bulu Kabupaten Simalungun). *Jurnal Akar*. 2(1):1-14. 10.36985/jar.v9i1.188
- Elena, Y., Aviati, Y., Nikmatullah D. 2021. Hubungan antara pelaksanaan program hutankemasyarakatan dengan kinerja penyuluh kehutanan di Provinsi Lampung. *Jurnal Kirana*. 2(2):1-8. Doi: <https://doi.org/10.19184/jkrm.v2i2.25776>
- Fisher, M.R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E.L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., Sahide M.A.K. 2018. Assereng The New Social Forestry Projrct In Indonesia: Recognition, Livelihood And Conservation. *International Forestry Review*. 20(3), 346-361. Doi: <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Gaol, C.I.L., Manalu, J., Rumahorbo, B.T. 2022. Strategi Pengembangan Program Konservasi berbasis pemberdayaan masyarkaak dengan model desa binaan dankemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop. *Jurnal Kehutanan Papua*. 8(2):1-17. Doi: <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasiasia.Vol8.Iss2.369>
- Guntoro, D.A., Purwantono., Kholiq, N., Ananda, A.A. 2018. Strategi Pengambangan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) Durian di Zona Tradisional Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Banyuwangi. *JSEP*. 11(1):1-6. Doi: <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i1.5679>
- Gunantoro E.S. 2017. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen dan Desa Karangudi di Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen). *Jurnal Litbang Sukowati*. 1(1):1-18. Doi: <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i1.6>
- Idris, F., Mukhrijal, Rasanjani, S. 2023. Efektivitas Program Rumah Layak Huni Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Sosio Konsepsia*. 12(2):1-14. Doi: <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2>

Zulfidda Lillah, Djuara P Lubis, Dwi Sadono

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember

- Jazadi, I., Irham, M., Widari, I.G.A., Suparman., Adelismula, R.J. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pola Agroforestry. *Jurnal Pengabdian Makarya*. 2(1), 1-6. Doi: <https://doi.org/10.29303/jpm.v2i1>
- [KLHK]. 2018. *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam*: Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- [KLHK]. 2023. *Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi)*: Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- Mariyani, I., Suciati, L.P. 2021. Modal Sosial Petani Rehabilitasi Dalam Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Meru Betiri. *Agriekonomika*. 10(1).1-8. Doi: <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9890>
- Mardikanto, T., Poerwoko, S. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mauludi, R.N.I.H., Aryani, L., Priyanti E. 2023. Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ddesa Melalui Bumdes (Studi di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor). *Journal Of Social Science Research (INNOVATIVE)*. 3(4). 1-10. Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3660>
- Okthalamo, V., Iskandar, D.A., Masturiatna, A. 2022. Implementasi Progam Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*. 8(2):1-14 Doi: <https://doi.org/10.20886/jped.2022.8.2.111-124>
- Peran AP, Kaho LMR, Pramatana F, Mau AE. 2023. Community Behavior In Environmental Preservation Efforts (Case Study Of The Wail Awe Spring In The Kumah Protected Forest, East Adonara District, East Flores Regency). *Media Konservasi*. 28(2):1-7.
- Putri, V.A., Tresiana, N., Apandi. 2022. Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa Di Taman Nasional Way Kambas. *Administrativa* .4(2):1- 16. Doi: <https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i2.177>
- Prasetya, H.W, Sadono D, Hapsari D.R. 2023. Dinamika Kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Penyuluhan*. 19(02):1-16. Doi: <https://doi.org/10.25015/19202345323>
- Prayitno, D.E. 2020. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 6(2):1-26. Doi: <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Saragi H. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Hutan Raya. *Jurnal Sosial dan Sains*. 3(1):1-6. Doi: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i1.664>
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT. Alfabeta
- Suharto E. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Situmorang AO, Roslinda E, Hardiansyah G. 2022. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Rantau Malam. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*. 1(1):1-14.
- Sitaesmi, D. T., R. A. Nugroho, D. L. Putri. 2023. Environmental damage and land use changes: forest protection strategy. The 4th International Conference on Agriculture and Bio-industry (ICAGRI-2022). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1183 (2023) 012074. Doi: 10.1088/1755-1315/1183/1/012074
- Yumantoko. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB. *Sosio Konsepcia*. 11(02)364–378. Doi: <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3076>
- Yogia MA, Suri DM. 2020. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepcia*. 9(03):1-10. Doi: <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1874>
- Wiratno. 2018. Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun “Organisasi Pembelajar”. Jakarta. Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wahyuni H, Suranto. 2021. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6(1):1-15. Doi: <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.100>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).